

PENGEMBANGAN KURIKULUM RESPONSIF UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU MELALUI PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA

Warman¹, Eni Susilowati², Zunus Matori³, Mariano Setiawan⁴, Yohanes Tominsen⁵
warman@fkip.unmul.ac.id¹, eni.aya12@gmail.com², matorizunus@gmail.com³,
marianoaveirojr@gmail.com⁴, yohanestominsen@gmail.com⁵

Universitas Mulawarman

Abstrak

Kurikulum menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar. Pengembangan Kurikulum di setiap jenjang sekolah perlu menjawab segala tantangan dan tuntutan perubahan zaman di era revolusi 4.0 dan Society 5.0. Oleh karena itu, Sejak tahun 2022, Kemenristek mulai menerapkan kurikulum Merdeka untuk bentuk pengembangan kurikulum yang responsif untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan kurikulum merdeka sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang responsif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Studi literatur digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data dari penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kurikulum merdeka merupakan pengembangan Pengembangan kurikulum responsif mampu menciptakan pendidikan bermutu sebagai upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized).

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Bermutu, Kurikulum Merdeka.

Abstract

The curriculum is a guideline and guide in implementing the learning activity process. Curriculum development at every school level needs to answer all the challenges and demands of changing times in the era of Revolution 4.0 and Society 5.0. Therefore, since 2022, the Ministry of Research and Technology has begun to implement the Merdeka curriculum as a form of responsive curriculum development to improve quality education. The purpose of this study is to examine the application of the independent curriculum as a form of responsive curriculum development in improving the quality of education. This research uses a descriptive qualitative method using literature study as a data collection technique. Literature study was used as a data collection technique because this research was conducted using data sources from previous research and related documents relevant to the research topic. The results showed that the implementation of an independent curriculum is a development of responsive curriculum development capable of creating quality education as an organized, planned, and continuous effort (continuously throughout life) towards fostering humans/students to become complete, mature, and cultured (civilized) people.

Keyword: Curriculum, Quality Education, Independent Curriculum.

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan zaman sudah memasuki era *Society 5.0* artinya setiap aspek kehidupan dikaitkan dengan teknologi, menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan berinovasi. Menurut Aisy (2024), *Society 5.0* memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas dengan menggunakan berbagai teknologi canggih. Menanggapi perkembangan zaman yang terus berubah maka berbagai upaya kebijakan dilakukan oleh berbagai negara agar tidak tertinggal. Kebijakan utama yang dilakukan adalah mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan unggul. Hal yang pertama kali dilakukan dalam mempersiapkan SDM yang terampil dan unggul adalah meningkatkan pendidikan yang bermutu dan respon terhadap dinamisme perkembangan teknologi.

Kurikulum mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Sesuai yang disampaikan oleh Hartati dalam Pangestu (2022) menyampaikan bahwa Kurikulum adalah media yang menentukan terhadap keberhasilan proses pendidikan, dalam artian bahwa tanpa kurikulum yang baik dan sesuai akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Kurikulum menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar. Pengembangan Kurikulum di setiap jenjang sekolah perlu menjawab segala tantangan dan tuntutan perubahan zaman. Sebagaimana dengan gagasan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara bahwa Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai ruh pendidikan, Kurikulum harus bergerak dinamis, inovatif serta responsive terhadap sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEKS, kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan.

Sejak tahun 2022, Kemenristek mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Berdasarkan pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kebijakan merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Kurikulum Merdeka dijelaskan oleh Fahlevi dalam Fakhri (2023), bahwa mampu memberikan penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Peserta didik diajak untuk mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan penilaian yang mendalam terhadap informasi yang mereka terima. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan mengembangkan solusi inovatif. Selain itu, kurikulum ini juga mendorong pengembangan kreativitas peserta didik dengan memberikan ruang untuk berimajinasi, berkreasi, dan berinovasi dalam proses pembelajaran.

Penerapan kurikulum merdeka tentu tidak mudah dilaksanakan. Setiap satuan pendidikan pasti akan menemui berbagai kendala, baik SDM maupun SDA pendukung. Oleh karena itu, penting bagi setiap satuan pendidikan meninjau pengembangan kurikulum yang tepat dan sesuai sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.

Secara umum pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kurikulum merdeka sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang responsif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu merefleksi dan memperbaiki sistem pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang responsif menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan mampu menyiapkan generasi yang siap di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang solusi yang berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Menurut Moleong yang dikutip oleh Fakhri (2022), metode kualitatif deskriptif dilakukan untuk memahami serta menjelaskan karakteristik suatu fenomena sosial secara mendalam dan detail, serta menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis dan objektif. Dalam metode ini, data yang terkumpul diinterpretasikan secara subyektif oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Pada metode ini, peneliti berusaha untuk memahami pengalaman dan perspektif orang yang terlibat dalam fenomena yang diteliti dengan memperoleh data melalui analisis dokumen.

Studi literatur digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data dari penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji kembali hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Penerapan kurikulum merdeka merupakan bagian pengembangan kurikulum responsif untuk pendidikan bermutu sesuai dengan perubahan zaman. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur merupakan metode yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum

Kurikulum sudah banyak ditafsirkan oleh banyak pakar oleh pakar pengembang kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Dapat dipahami jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Kurikulum menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Sesuai pendapat Rusman (2009), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pangestu: 2022, 4).

Pangestu (2022) juga menjelaskan bahwa Definisi paling umum dari kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Konsep kurikulum sebagai pengalaman belajar lebih baik menggambarkan situasi yang lebih akurat daripada konsep lain. Sekolah didirikan untuk mendidik siswa, yaitu bahwa mereka berkembang sesuai dengan jalur tertentu. Perkembangan ini hanya dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang mereka peroleh. Kurikulum sebagai cetak biru untuk pendidikan harus mengarah pada penyediaan pengalaman belajar bagi siswa yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan dengan benar. Kurikulum juga sering diartikan sebagai materi pelajaran atau materi pelajaran untuk peserta didik, atau rencana pelajaran. Baik itu rencana, dokumen, atau pedoman belajar, atau pengalaman belajar yang diadopsi oleh seseorang, akan mengarahkannya dalam melakukan kegiatan belajar (Lase 2018, p. 49-50). Kurikulum memiliki posisi yang sangat penting dalam seluruh proses pendidikan. Konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan alur atau teori pendidikan. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disusun di dalam kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah mengacu pada banyak pengertian kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurikulum

merupakan perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pada tingkat satuan pendidikan yang mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan Pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan maka Konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan alur atau teori pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2. Pengembangan Kurikulum Responsif

Menurut Pangestu (2022) Pengembangan Kurikulum merupakan upaya dalam merencanakan dan mengatur tentang tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sekaligus cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Al_fatih (2022) menyampaikan tujuan kurikulum merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, karena dari tujuan inilah kurikulum yang telah disusun pada suatu lembaga dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan oleh suatu lembaga pendidikan dalam mencetak lulusannya.

Dalam pengembangan kurikulum yang tepat perlu memperhatikan tujuh landasan. Sesuai yang disampaikan oleh Suwandi (2020) bahwa Pengembangan kurikulum yang baik didasarkan pada sejumlah landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, psikologis, konseptual-teoretis, historis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal, baik yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Artinya, pengembangan kurikulum menjadi penentu mutu capaian pembelajaran, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian proses dan hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan, dan mutu lulusan. Menurut Olivia, terdapat aliran filsafat yang membahas pengembangan kurikulum, yaitu (1) Filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang berusaha membangun peradaban secara dinamis tanpa terhenti oleh kemapanan, di samping mengembalikan arti kebebasan manusia sesuai dengan fitrahnya, (2) Filsafat Progresivisme, menolak segala bentuk otoritarianisme dan absolutisme pendidikan serta berorientasi ke masa depan (*progress*) sehingga tidak bersifat instan kekinian (*the present*), (3) Filsafat Esensialisme bercirikan atas pandangan-pandangan humanisme dengan berorientasi mempertahankan nilai-nilai., dan (4) Filsafat Perennialisme bercirikan atas norma-norma (nilai-nilai) kekekalan (abadi). Sesuai dengan namanya, perennial ('abadi atau kekal'), aliran ini juga merupakan gelombang penolakan atas modernitas di Barat yang cenderung kering dari nuansa religius (Suwandi, 2020). Namun kiranya perlu disadari bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas.

Secara sosiologis, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pengembangan kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian pendidikan diharapkan mampu menyiapkan generasi yang siap dan handal untuk kebutuhan di Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0. Secara landasan Psikologi, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik tidak menjadi korban dari kurikulum yang diajarkan.

Secara teoritis, Standar pendidikan mengacu pada standar nasional sebagai kualitas minimal yang selanjutnya diderivasi menjadi standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran lulusan), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. Kurikulum berbasis capaian dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta

didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap (spiritual dan sosial), berpengetahuan, dan berketerampilan. Pada Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan dengan memperhatikan dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Secara yuridis, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tentu harus mengacu pada sejumlah regulasi yang ada. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan mengakomodasi antara lain Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Menurut Pangestu, Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah prinsip yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip pemilihan kegiatan penilaian.

Sesuai dengan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum secara umum pengembangan kurikulum secara dinamis dan respon terhadap segala perubahan atau bisa disebut dengan kurikulum responsif. Sesuai yang disampaikan Akkerma dan Bakker dalam jurnal [Vreuls \(2022\)](#) mendefinikan bahwa kurikulum responsif sebagai kurikulum yang autentik, terkini dan (sebagian) terbuka, terdiri dari modul-modul yang mudah diganti dan idealnya ditempatkan pada tingkat praktik profesional. Semua elemen, baik pelajar, profesional, guru, lingkungan belajar dan kerja saling berhubungan dan sangat bergantung, yang selaras dengan gagasan lingkungan belajar hibrid. Lebih lanjut, gagasan pengembang kurikulum tentang kurikulum responsif bersifat terbuka dan fleksibel sejalan dengan gagasan De Vries (2016) bahwa kurikulum responsif memerlukan apa yang disebut permeabilitas. Kurikulum permeabel mempunyai inti yang kuat: identitas atau “sumsum tulang belakang” kurikulum. Selain itu, kurikulum memberikan ruang yang leluasa dan dapat terus-menerus diadaptasi secara lebih ad hoc sesuai dengan perkembangan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, topik-topik baru dapat dimasukkan sementara ke dalam kurikulum atau akhirnya menjadi bagian inti kurikulum.

Sesuai dengan asas pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa Pendidikan Pendidikan memberikan tuntunan Terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan berhubungan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada.

Menurut KHD, kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki (isi) keterampilan sesuai zamannya. Dalam ihwal kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri (irama) dengan zaman, dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru

memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah, pengembangan kurikulum yang responsif sangatlah penting, dan para pengembang kurikulum perlu melakukan hal tersebut semakin meramalkan dan memasukkan perubahan ke dalam kurikulum mereka pada waktu yang tepat. Kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan sosial seperti yang dijelaskan oleh Wahyuni (2022) menjadi penting dalam memastikan bahwa materi pembelajaran mencakup isu-isu yang relevan dalam masyarakat dan memberikan pemahaman yang holistik.

Pengembangan Kurikulum di Indonesia tidak lepas dari Asas dan dasar dari Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pengembangan kurikulum responsif sangat tepat diterapkan di Indonesia dalam menghadapi segala perubahan kebutuhan murid, lingkungan, dan zaman dalam menciptakan generasi yang siap, terampil dan tangguh.

3. Pendidikan Bermutu

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi. (Sauri, 2003)

Pendidikan bermutu menjadi idaman masyarakat. Mereka mencari sekolah yang dapat menjamin anak-anak mereka menjadi lulusan yang berkualitas. Namun yang menjadi dilema, masyarakat cenderung melihat mutu secara permukaan (surface), seperti gedung yang megah, fasilitas yang lengkap, atau lulusan yang cepat bekerja. Tidak masuk pada ranah substantif mutu, setidaknya saat ditanya tentang hakikat mutu, masyarakat tidak mampu memaparkannya. Adapun mutu secara substantif adalah seberapa mampu pengelola pendidikan memuaskan pelanggan (customer) bahkan melebihi apa yang mereka harapkan. Dalam konteks ini, masyarakat sebaiknya mampu memetakan apa yang mereka butuhkan dari pendidikan yang mereka pilih. Sehingga hasil pendidikan benar-benar dapat mereka manfaatkan. Pada setting masyarakat kapitalisme, kebutuhan diidentikan dengan peluang kerja. Dengan demikian, terjadilah hukum supply dan demand. Sekolah yang dianggap memberikan akses pada peluang kerja tersebut akan menyeleksi calon peserta didik secara ketat dan tidak menutup kemungkinan mematok biaya pendidikan yang lebih tinggi dibanding sekolah yang tidak demikian. Masyarakat melabeli sekolah tersebut dengan sebutan favorit. Sementara itu, sekolah yang dianggap tidak favorit, akan mencari calon peserta didik dan tentunya dengan biaya yang lebih rendah. Pemerintah membuat regulasi mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan dirilisnya Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016. Salah satu tujuannya adalah agar perguruan tinggi memiliki kepedulian (concern) terhadap mutu dengan diterapkannya sistem penjaminan mutu. Secara luas, pemerintah ingin pemeratakan mutu pendidikan dari Sabang hingga Merauke. Namun, upaya ini belum mampu mengubah mindset masyarakat terhadap mutu pendidikan, diantaranya pilihan studi yang menitikberatkan pada ketersediaan pasar, cepat bekerja dan hidup mapan. Seolah-olah pendidikan hanya dimaknai terhadap pemenuhan kebutuhan duniawi saja, tidak berpikir jauh daripada itu.

(Kodrat, 2019)

Sebagaimana yang diungkap pentingnya mengubah pola berpikir terhadap hakikat pendidikan untuk membangun pendidikan yang bermutu, maka langkah berikutnya yang perlu dilakukan dalam mengubah *mindset*, yaitu: (1). Mengubah pola pikir terhadap pembuat keputusan (*decision maker*) di level makro pendidikan, dalam hal ini dimulai pada tingkat menteri, pejabat setingkat eselon 1 baik pusat maupun daerah serta pejabat pelaksana. Pengubahan pola pikir tentang pendidikan ini sangat penting mengingat selama ini pada level pembuat keputusan, *mindset* yang dikembangkan adalah orientasi anggaran (*budget oriented*). Meski memang pertimbangan membuat kebijakan pendidikan dan struktur kurikulum melihat potensi tantangan luar, namun dalam tataran implementasi yang melibatkan birokrasi pendidikan, ruh atau spirit pembuatan kebijakan tereduksi oleh orientasi anggaran. Oleh karena itu, pembuatan regulasi pendidikan sebaiknya mampu mengubah pola pikir hingga level implementasi. Termasuk dalam hal ini pengubahan landasan filosofis pendidikan yang selama ini cenderung mengikuti filosofis dunia Barat yang cenderung sekuleris-materialis, sehingga tercermin dalam struktur kurikulum yang nampak tidak kompatibel dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana mungkin membentuk generasi pelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia bila upaya penanaman nilai-nilai tersebut hanya diberikan porsi dua jam pelajaran satu minggu untuk mata pelajaran pendidikan agama, atau dua sks untuk mata kuliah agama. (2). Perlu penerapan *reward* dan *punishment* yang konsisten pada level makro dan mikro pendidikan yang berkaitan dengan tata kelola pendidikan di level tersebut, termasuk pada proses rekrutmen dan pengawasan pengelola pendidikan. *Reward* dapat diberikan oleh pemerintah kepada pimpinan sekolah saat ia mampu mencapai bahkan melampaui visi yang ditetapkan. Sementara itu, *punishment* diberikan apabila ia tidak dapat mencapai visi tersebut. Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam komite sekolah dalam memberikan saran dan pengawasan terhadap pengelola pendidikan. (3). *Stakeholder* pendidikan memberikan tantangan (*challenge*) terhadap pemimpin sekolah untuk membuat cetak biru (*blue print*) pengembangan sekolah yang hendak di capai. Cetak biru ini tidak seperti rencana strategi (*renstra*) sekolah yang berakhir pada tahap dokumen dan baru dibuka saat akreditasi sekolah dilakukan, melainkan menjadi sasaran pengembangan sekolah selama 5- 10 tahun ke depan. Saat ini memang ada dokumen seperti Rencana Jangka Menengah dan Panjang (RJMP) sekolah, sebagai bagian dari *renstra* sekolah, namun “tradisi” dan kebiasaan yang menyebabkan dokumen strategis ini tidak menjadi acuan pengembangan sekolah, selain hanya seongok dokumen pelengkap sekolah. Oleh karena itu, penting sekali membentuk pola pikir *stakeholder* pendidikan untuk tidak hanya membuat banyak dokumen, namun juga menjadi acuan pengimplementasiannya. (4). Perlu ditanamkan pola pikir kepada seluruh sivitas akademika bahwa pendidikan adalah darah peradaban. Ia menjadi cara menyiapkan generasi untuk estafeta kepemimpinan. Tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, namun juga untuk kepentingan akhirat. Penyiapan generasi yang shalih menjadi sangat penting. Penyiapan generasi ini perlu dimulai dengan penyamaan frekuensi visi dari seluruh *stakeholders* pendidikan. Tentunya, sistem yang selama ini menyuburkan nilai-nilai materialisme sekularistik dan sekaligus membuka celah korupsi, suap dan tindakan menyimpang lainnya perlu direvisi dan diubah. Perubahan ini harus dilakukan dengan sistem yang dapat menanamkan nilai-nilai spiritual yang di dalamnya terjadi pengawasan yang terikat dan terus menerus sebagai manifestasi dari prinsip ihsan, yaitu ia meyakini bahwa Yang Maha Kuasa senantiasa mengawasinya tanpa jeda dan tanpa batas. Disaat yang sama, ia meyakini bahwa keseluruhan aktivitasnya akan dimintai pertanggungjawaban tidak

hanya di dunia namun juga di akhirat. Sistem inilah yang akan melahirkan keshalihan sosial dimana nilai-nilai yang didapat dari ibadah ritualnya secara langsung diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. (Kodrat, 2019)

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Menurut Philip B. Crosby kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan proses jadi. Untuk menjawab tantangan Nasional dan Internasional maka perlu menerapkan pendidikan bermutu. Dimana pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran akan mutu pendidikan akhir-akhir ini kian meningkat, hal ini terlihat dari keseriusan berbagai institusi pendidikan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan transparansinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peningkatan mutu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Meskipun kenyataannya pendidikan nasional Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini kualitas akhlak masyarakat Indonesia semakin jauh dari nilai Pancasila. Hal ini dapat terlihat dari sikap anarkisme dari para demonstran yang menyuarakan aspirasinya, serta maraknya kejahatan yang terjadi. Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (Kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan merdeka belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. (Ananda et al., 2023)

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan yang bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem kelola yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu. Materi pelajaran yang baik dan harus dilakukan guna mencapai tercapainya pendidikan yang bermutu ialah materi pelajaran yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, baik dirasakan langsung maupun kemudian hari, materi pelajaran tersebut harus memberikan wawasan yang bersifat meningkat secara terus-menerus, materi pelajaran tersebut harus memberikan semangat, motivasi, dan kreativitas berpikir bagi peserta didik. 1) Perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya dimaksudkan untuk menetak dan mempersiapkan masa depan peserta didik agar mereka dapat hidup dengan baik di zamannya, tapi juga mempersiapkan dan membekali mereka ketika manusia

menghadap tuhan. 2) Tata kelola yang baik adalah sistem tata kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif atau utuh, artinya pembangunan pendidikan bukan meningkatkan anggaran saja tapi juga memperhatikan kualitas guru budaya belajar peserta didik, sarana prasarana belajar, manajemen pendidikan, kebijakan dan program, serta produk dan daya dukung lingkungan. Tata kelola pendidikan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarfungsi dan peran antar komponen yang satu dengan yang lain. Tata kelola yang baik juga harus bersifat terukur, artinya uang yang diberikan oleh orang tua peserta didik berubah menjadi sikap, pemikiran dan perilaku yang bagaimana. Selain itu sistem tata kelola juga harus berkesinambungan, artinya memperhatikan prinsip keseimbangan antara kekuatan satu komponen dengan komponen lainnya. 3) Pendidikan yang bermutu juga dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Guru yang baik bukan sekadar guru yang pintar, tapi guru yang memintarkan peserta didik. Guru yang baik bukan sekadar guru yang berkarakter, tapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya. Selain itu, Guru sebagai tumpuan terciptanya pendidikan yang bermutu harus selalu mengembangkan 3 kemampuan dan keprofesionalannya. Pendidikan yang bermutu diawali dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah guru yang selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat proses pembelajaran dan melakukan perbaikan serta mengembangkan ide-ide inovatif dibidang pendidikan. 4. Mengingat guru harus mampu mengembangkan pembelajaran dengan beragamnya latar belakang kemampuan, pemahaman, mengalami minat, motivasi, gaya, dan kecepatan belajar para peserta didik bisa dengan melakukan strategi pembelajaran yang efektif misalnya dengan metode mengajar berperan untuk menyinergikan beragamnya potensi atau kemampuan, minat karakteristik pengalaman, kebutuhan, kebiasaan, dan gaya belajar peserta didik, bisa juga dengan mengembangkan pola pembelajaran antara lain ketika guru mampu memosisikan peserta didik sebagai manusia yang penting, berharga, dan berkemampuan, guru juga harus mampu menguasai dan menamkan daya pengaruh dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, guru menggunakan variasi model pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran yang bersifat klasikal dengan pola belajar individual melalui pola belajar tuntas, selain itu juga perlu pengembangan sistem evaluasi. Untuk mendukung tercapainya pola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pimpinan lembaga pendidikan mesti melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberdayakan lembaganya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberi pupuk secara tepat epada lembaga yang dianggap sehat dan mengobati lembaganya yang dianggap berpenyakit. Untuk mengetahui hal itu, para pimpinan lembaga pendidikan harus melakukan analisis secara tepat. Supaya pimpinan bisa melakukan treatment secara tepat. (ZA, 2017)

4. Kurikulum Merdeka

Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem kurikulum dengan tujuan penyempurnaan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyempurnaan yaitu mengubah dan memberi inovasi kurikulum. Di antaranya kurikulum KTSP/2006 menjadi Kurikulum 2013 hingga menjadi Kurikulum Merdeka Belajar.

Merdeka belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir.

Guru juga memiliki target tertentu dari pemerintah seperti akreditasi, administrasi, dan lain-lain. Tentu dalam keadaan seperti ini peserta didik tidak dapat secara luwes berkembang dalam pembelajaran karena hanya terpaku pada nilai saja. Dengan adanya merdeka belajar, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minatnya karena peserta didik juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan ilmu yang disampaikan oleh guru.

Merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

adalah jawaban terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya merdeka belajar, beban dan tugas dari seorang guru lebih diminimalisir mulai dari pengadministrasian sampai pada kebebasan dari tekanan intimidasi.

Pembelajaran merdeka belajar mengutamakan minat dan bakat peserta didik yang dapat memupuk sikap kreatif dan menyenangkan pada peserta didik. Kurikulum merdeka belajar menjawab semua keluhan pada sistem pendidikan. Salah satunya yaitu nilai peserta didik hanya berpatokan pada ranah pengetahuan. Di samping itu, merdeka belajar membuat guru lebih merdeka lagi dalam berpikir sehingga diikuti oleh peserta didik.

Konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin. *Pertama*, konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. *Kedua*, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya. Dilakukan melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar peserta didik dengan berbagai jenis instrumen; merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan; serta merdeka dari tekanan dan mempolitisasi guru.

Ketiga, membuka mata untuk mengetahui lebih banyak kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah. Mulai dari permasalahan siswa baru, administrasi guru dalam persiapan mengajar, proses pembelajaran, hingga masalah evaluasi seperti USBN-UN. *Keempat*, guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum ini berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka diterapkan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ini ditujukan kepada guru.

Dasar Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Dasar pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Surat Keputusan Menteri ini menetapkan 16 keputusan, yaitu sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
2. Pengembangan kurikulum mengacu pada Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan/revisi, dan Kurikulum Merdeka.
3. Kurikulum mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
4. Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
5. Kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
6. Kurikulum Merdeka diatur di lampiran SK Mendikbudristek.
7. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi Kurikulum Merdeka diatur di lampiran II SK ini.
9. Peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan menggunakan Kurikulum Merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linieritas sesuai kedua lampiran SK ini.
10. Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan mulai kelas I sampai kelas XII.
11. Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
Tahun ke-1: Umur 5 & 6 tahun (kelas 1, 4, 7, dan 10).
Tahun ke-2: Umur 4–6 tahun (kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11).
Tahun ke-3: Umur 3–6 tahun (kelas 1–12)

12. Pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh Pusat Perbukuan.
13. Kurikulum Merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023
14. Keputusan ini mencabut 2 aturan berikut.
 - a. SK Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada suatu pendidikan dalam kondisi khusus.
 - b. Ketentuan kurikulum serta beban kerja dan linieritas pada program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan (Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022).

Tujuan Kurikulum Merdeka

Pada masa Covid-19, pendidikan di Indonesia menjadi terbelakang dan ketinggalan. Kebijakan Kurikulum Merdeka menjadi solusi terhadap ketinggalan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang berkembang di lingkungan.

Kelebihan Kurikulum Merdeka

Adapun kelebihan dari Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut.

1. Lebih sederhana dan mendalam

Materi yang esensial menjadi fokus pada Kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang sederhana dan mendalam tanpa tergesa-gesa akan lebih diserap peserta didik. Pembelajaran mendalam dengan rancangan yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih fokus dan tertarik dalam belajar.

2. Lebih merdeka

Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi tolok ukur dalam merancang pembelajaran. Konsep merdeka yang diberikan memberikan kemerdekaan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan akan menjadi baik bila diterapkan, dibandingkan dengan merancang dengan tidak melihat kebutuhan peserta didik.

3. Lebih relevan dan interaktif

Kegiatan proses pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif akan memberikan dampak yang baik bila diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Pembelajaran interaktif dengan membuat suatu proyek akan membuat peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan isu-isu yang beredar di lingkungan.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan akan lebih sederhana dan mendalam karena jam pelajaran pada ini yaitu 1 jam untuk intrakurikuler dan 1 jam untuk penguatan Profil Pancasila. Pembelajaran lebih merdeka juga menjadi kelebihan dari Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan hak otonom kepada sekolah untuk merancang sesuai dengan kebutuhannya.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi adalah usaha dalam menerapkan suatu hal. Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana.

Adapun tujuan dari implementasi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program kampus mengajar perintis di sekolah dasar yaitu membantu menyelesaikan problematika di persekolahan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Bentuk kegiatannya berupa membimbing peserta didik dan memberdayakan peralatan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar.

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka terdapat intrakurikuler serta penguatan profil pancasila dan ekstrakurikuler. Penerapan Kurikulum Merdeka dengan mengalokasikan waktu akan dirancang hingga satu tahun serta dilengkapi dengan alokasi jam pelajaran yang disampaikan setiap minggunya.

Kurikulum Merdeka bisa saja terus dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua, melihat dari asesmen nasional yang bertujuan untuk mengukur bagaimana penalaran dari peserta didik bukan hanya pengetahuan saja. Ketiga, jika publikasi semakin menyebar luas maka kemungkinan kecil Kurikulum Merdeka dihentikan.

Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menjawab keluhan dan masalah yang terjadi pada kurikulum sebelumnya. Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat di sekolah penggerak. Implementasi kurikulum ini menekankan pada bakat dan minat peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.

Implementasi diartikan sebagai suatu tindakan dari suatu perencanaan yang sudah disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang berlanjut pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang sesuai perencanaan. Implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain.

Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan. Kaitannya dengan implementasi MBKM di lingkungan perguruan tinggi ataupun sekolah tingkat dasar dan menengah tentu dipengaruhi oleh kurikulum, kelas, peserta didik, guru, mahasiswa, dosen, hingga pendanaan yang tidak murah.

Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya pasti akan berjalan dengan baik. Kurikulum ini juga sangat membantu menyelesaikan problematika sekolah selama masa Covid-19. Pada masa itu pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. Pembelajaran menggunakan kurikulum lama dengan metode lama tentu tidak akan efektif dan tidak efisien lagi. Selain menjadikan peserta didik tidak memahami secara keseluruhan tentang pembelajaran, guru pun juga bingung bagaimana cara membuat peserta didik mengerti dengan materi ajar. MBKM yang direncanakan. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta di antaranya program pertukaran pelajar antar-prodi maupun antarperguruan tinggi di dalam perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi.

Kurikulum Merdeka Belajar pada dasarnya memiliki orientasi pada OBE (*Outcome Based Education*). OBE merujuk pada proses pendidikan yang berfokus terhadap pencapaian hasil konkret yang ditentukan. Dalam kata lain, pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan, dan perilaku. Pendidikan berbasis hasil saat ini sangat potensial dalam lanskap pendidikan global. Dalam beberapa tahun terakhir, menerapkan pendidikan berbasis hasil dan pembelajaran yang berpusat pada. Pendidikan berbasis hasil telah didefinisikan secara luas dalam literatur berbeda. Pendidikan berbasis hasil juga sebagai desain, pengembangan, dan pendokumentasian instruksi yang tujuan dan hasilnya telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Khoirurrijal (2022) acuan pelaksanaan kurikulum merdeka menggunakan model *The Systematic Action Research Model*. Yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada Perencanaan mencakup rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum dan tujuan khusus suatu organisasi atau lembaga penyelenggaraan pendidikan berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Implementasi kurikulum merdeka bersifat leluasa sesuai dengan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di tingkat perguruan tinggi, Proses pembelajaran dalam lingkup kampus merdeka merupakan salah satu manifestasi pembelajaran yang menjadikan mahasiswa sebagai Pusatnya dengan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Implementasi kurikulum merdeka bertujuan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sehingga

lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Tujuan yang baik tersebut harus diimbangi dengan tinjauan berkelanjutan. Evaluasi pada dasarnya memiliki posisi penting dalam pengembangan kurikulum. Selain sebagai pengasapan kurikulum yang dijalankan, evaluasi—khususnya dalam ranah merdeka belajar—berfungsi sebagai media konfirmasi atas berhasil atau gagalnya kurikulum yang dibangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang diteliti dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran sebagai pedoman pada tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan yang responsif terhadap segala perubahan kebutuhan murid, lingkungan, dan tuntutan zaman adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Fleksibilitas kurikulum, pendekatan interdisipliner, peningkatan keterlibatan peserta didik, pengembangan keterampilan sesuai perkembangan zaman di era 4.0 dan *Society 5.0*, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan merupakan komponen utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran.

Pengembangan kurikulum responsif merupakan pengembangan kurikulum yang secara dinamis merespon segala perubahan sesuai dengan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum perlu mencakup Semua elemen, baik pelajar, profesional, guru, lingkungan belajar dan kerja saling berhubungan dan sangat bergantung, yang selaras dengan gagasan lingkungan belajar hibrid. Oleh karena itu, pendidik perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan teknologi dalam kelas, serta perlunya penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan untuk memperbarui kurikulum dan perangkat pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Keterlibatan peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan implementasi. Selain itu, perlu dibentuk komunitas pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antara pendidik dan praktisi pendidikan untuk berbagi pengalaman dan best practice. Kurikulum Merdeka Belajar berorientasi pada OBE (*Outcome Based Education*) yang merujuk pada proses pendidikan yang berfokus terhadap pencapaian hasil konkret pada hasil, kemampuan, dan perilaku. Selain itu, kurikulum merdeka juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dengan meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa. Perbaikan serta pembaruan sarana dan prasana pembelajaran perlu dilakukan oleh satuan pendidikan demi kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka.

Implementasi kurikulum merdeka menekankan pada bakat dan minat peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kelebihan yang paling menonjol dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri.

Dengan demikian, Penerapan kurikulum merdeka merupakan pengembangan Pengembangan kurikulum responsif mampu menciptakan pendidikan bermutu sebagai upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized).

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, Salsabila Rohadatul, Resty Safitru, Rustam. (2024). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dalam Menghadapi Era Society 5.0 di SMP N 7 Kota Jambi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*. Vol. 14, No. 1, Januari 2024 e-ISSN 2549-2594
- Al-Fatih, Muhammad, dkk. (2022). Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Implementasi di SD Terpadu Muhammadiyah 36, *jurnal Pendidikan*. Vol. 6 , No. 1, Februari 2022, pp. 421-427.
- Ananda, R., Wibisono, W. C., Kisvanolla, A., & Purwita, P. A. (2023). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 7(2), 693–708. <https://doi.org/10.30601/dedikasi.v7i2.4028>
- Fakhri, Akhmad. (2023). “Kurikulum Merdeka dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran: Menjawab Tantangan Sosial dalam Meningkatkan Ketrampilan Abad 21”.
- Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka)
- Khoirurrijal, dkk. 2022. Pengembangan Kurikulum. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kodrat, D. D. (2019). Urgensi Perubahan Pola Pikir Dalam Membangun Pendidikan bermutu. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v2i1.23>
- Mudrikah A., Khorri A., dan Hamdani H., “Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara”, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5 No.1 (2022).
- Naufal H., Irkhamni I., dan Yuliyani M. “Penelitian Penerapan Program Sistem Kredit Semester Menunjang Terealisasinya Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan”. *Jurnal Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol.1 No.1 (2020).
- Ningrum A. S., “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar (Metode Belajar)”, *Prosiding Pendidikan Dasar*, Vol.1 (2022)
- Pangestu, Hanes Fuji, dkk. (2021). Pentingnya Pengembangan Kurikulum di Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol.6, No.02.
- Ruhaliyah, dkk., “Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran “Merdeka Belajar” Bagi Guru Bahasa Sunda Di Kota Sukabumi”, *Dimasatra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1 (2020).
- Sabriadi H. R. dan Wakia N. 2021, “Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi”, *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.11 No.2 (2021).
- Sari R. M., “Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan”, *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1 (2019).
- Suryaman, Maman.(2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar, *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 13-28. Diakses 21 Oktober 2020. E-ISBN : 978-602-5830-27-3
- Suwandi, Sarwiji. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21, *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 1 -12. Diakses 21 Oktober 2020.
- Vhalery R., Albertus M. S., dan Ari W. L., “Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, *Research and Development Journal of Education*, Vol.8 No.1 (2022)
- ZA, T. (2017). Restrukturisasi Untuk Pendidikan Bermutu. *Research in Education*, April. https://www.researchgate.net/profile/Tabrani-Za/publication/332303179_Restrukturisasi_untuk_Pendidikan_Bermutu/links/5cacdb35299bf193bc2d932e/Restrukturisasi-untuk-Pendidikan-Bermutu.pdf